

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menunjang tinggi hak-hak serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.²

Tujuan diselenggarakan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.³

Kesejahteraan keluarga miskin adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan keluarganya yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan mengenai kesejahteraan yang banyak ditemui

² Adi Fahrudin, *“Pengantar Kesejahteraan Sosial”*, (Bandung: Reflika Aditama, 2012), Hal. 9.

³ Ibid, Hal. 10.

di masyarakat.⁴ Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena multiface atau multidimensional. Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas atau kelompok masyarakat berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu.⁵

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan warga suatu Negara dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan minimnya lapangan kerja, Kemiskinan juga dapat akibat dari ketidakdemokrasian bagi masyarakat yang mencerminkan hubungan kekuasaan serta menghilangkan warga negara dalam memutuskan setiap masalah yang menjadi pusat perhatian mereka sendiri, sehingga masyarakat mayoritas penduduk kurang memperoleh lahan dan alat-alat teknologi dan sumber daya seperti pendidikan, kredit, serta akses pasar. Adapun penyebab lain dari kemiskinan itu antara lain: tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kesehatan fisik yang memprihatinkan, rendahnya tingkat

⁴ Sulastomo, "*Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hal. 14.

⁵ Ali Khomsan, dkk, "*Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*", (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2015), Hal. 1.

pendidikan dan kesehatan, serta hidup dalam lingkungan yang sulit mendapatkan pekerjaan.⁶

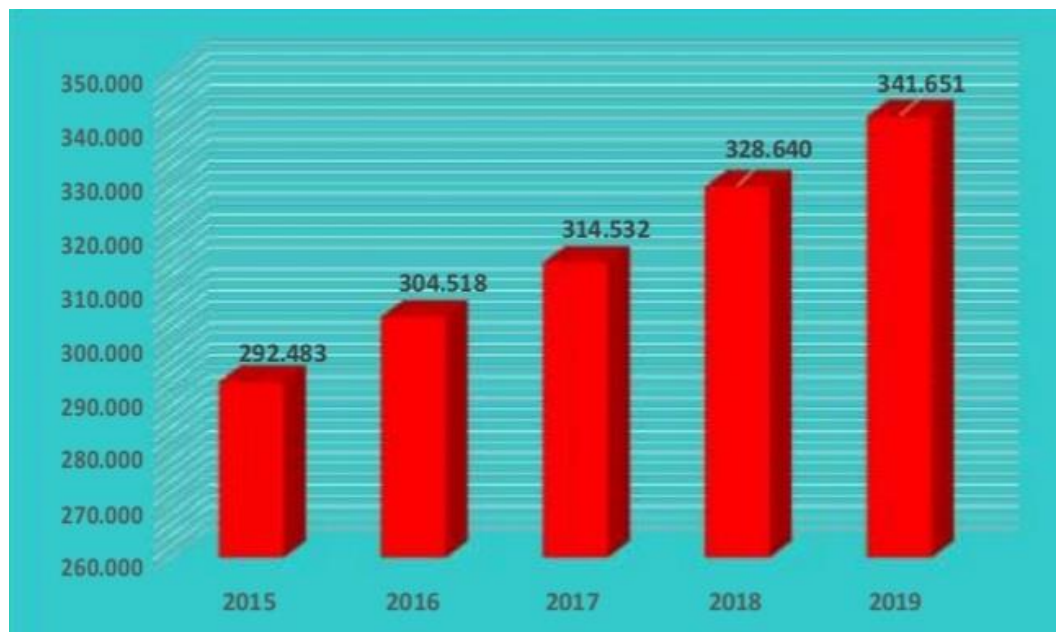
Kemiskinan memang haruslah segera ditangani secara serius oleh individu itu sendiri dan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang mempunyai atau yang tidak mempunyai sumber mata pencarian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi keluarganya.

Garis kemiskinan merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung setiap tahun meningkat. Pada tahun 2015 Garis Kemiskinan sebesar 292.483 rupiah/kapita/bulan dan menjadi 341.651 rupiah/kapita/bulan pada tahun 2019. Berikut garis kemiskinan di Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019:⁷

⁶ Edi Suharto, "*Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*", (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 74-75.

⁷ Data Statistika Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2020, Hal. 74-75.

Gambar 1.1
Garis Kemiskinan Kabupaten Tulungagung tahun 2015-2019



(Sumber: Garis Kemiskinan Kabupaten Tulungagung, Tahun 2015-2019)⁸

Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non-Tunai.⁹

Selanjutnya disusul dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai.¹⁰ Pemerintah mengeluarkan program bantuan terbaru bertajuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari Beras untuk Keluarga Sejahtera

⁸ Ibid, Hal. 75

⁹ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai.

¹⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai.

(Rastra). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan sosial pangan. Keberhasilan program bansos pangan sangat ditentukan oleh enam aspek (6T), yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Keenam aspek tersebut sampai saat ini masih menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial pangan, baik dalam bentuk bantuan sosial Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).¹¹

Adapun beberapa criteria penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 6T adalah:

1. Tepat sasaran penerima manfaat : Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hanya diberikan kepada rumah tangga berdasarkan hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan diberi identitas.
2. Tepat jumlah : Beras, telur dan kacang-kacangan/sayur-mayur/buah-buahan untuk setiap Kepala Keluarga (KK) dalam perbulan.
3. Tepat harga : Beras, telur, kacang-kacangan/sayur-mayur/buah-buahan yang diberikan kepada Kepala Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu gratis tidak dipungut biaya.
4. Tepat waktu : Pembagian beras, telur, kacang-kacangan/sayur-mayur/buah-buahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, “*Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Bantuan Sosial Pangan*”, (Jakarta, 2018), Hal.11.

5. Tepat kualitas : Beras, Telur, kacang-kacangan/sayur-mayur/buah-buahan layak untuk dikonsumsi.
6. Tepat administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Melihat dari permasalahan program Rasta terdahulu, maka pada tahun 2016 sampai 2017, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rasta, menjadi program Bantuan Pangan Non-Tunai yang mana dalam jangka panjang penyaluran bantuan pangan secara non-tunai diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi penerima manfaat, terutama memberikan dampak kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama pangan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Penyaluran bantuan pangan secara non-tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 kota yang mempunyai akses fasilitas yang memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan di perluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non-tunai. Mulai tahun 2018 subsidi rastra juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian mulai tahun 2018 bantuan pangan akan di salurkan ke masing-masing kabupaten/kota dalam bentuk non-tunai yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian kabupaten yang sarana prasarana non-tunai nya yang belum memadai tetap menyalurkan

rastra namun tanpa harga tebus yang harus di bayarkan keluarga penerima manfaat (KPM).¹²

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung tercatat memiliki angka penduduk miskin pada tahun 2019 yaitu 6,74 persen atau 70.010 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan 0,59 persen atau bertambah 6.390 jiwa, sehingga total jumlah angka kemiskinan di Tulungagung mencapai 7,33 persen atau 76.400 jiwa dari jumlah penduduk di Tulungagung sebanyak 1,1 juta jiwa. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat berhenti bekerja karena terkena PHK.¹³ Adapun jumlah Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Di Kecamatan Ngunut

No	Kelurahan	Jumlah KPM 2020	Jumlah KPM 2021
1	Pulotondo	213	210
2	Pulosari	434	453
3	Purworejo	273	295
4	Sumberjo Kulon	244	254
5	Ngunut 1	200	218
6	Ngunut 2	304	301
7	Ngunut 3	233	234
8	Gilang	357	378
9	Kalangan	138	153
10	Pandansari	210	216
11	Selorejo	138	153
12	Kromasan	240	250
13	Sumberjo Wetan	200	205
14	Kaliwungu	204	208

¹² Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, “*Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai*”, (Jakarta Pusat: Undang-Undang, 2017), Hal.3.

¹³ MayangkaraNews.com, “*Akibat Pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Di Tulungagung Meningkat*”, (Tulungagung, 2021)

15	Sumberingen Kidul	196	204
16	Sumberingen Kulon	82	83
17	Kacangan	163	175
18	Samir	167	181
19	Karangsono	129	127
20	Balesono	194	200
	Jumlah	4.319	4.498

(Data Penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Di Kecamatan Ngunut)¹⁴

Tabel di atas menunjukkan data penerima program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penerima di tahun 2021.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan program penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi oleh pemerintah yang diberikan melalui elektronik (E-Voucher). E-Voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras dan telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan. Di Kabupaten Tulungagung hampir seluruh Desa di Kecamatan Ngunut sudah menerima bantuan dalam bentuk beras sejak tahun 2017 yaitu berawal dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). Dan Desa Balesono merupakan salah satu Desa yang berada pada Kecamatan Ngunut yang juga sudah menerima bantuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). Bantuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Desa Balesono sebesar 15 kg beras setiap bulannya dengan dikenakan biaya tebus seharga Rp.1.600/kg. Dengan berjalannya waktu program pemerintah yang tadinya bernama Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2015 diganti menjadi Program

¹⁴ Dokumentasi Kantor Desa Balesono tahun 2020-2021.

Bantuan Sosial Keluarga Sejahtera (Rastra), bantuan dari pemerintah tersebut menjadi 10 kg beras setiap bulannya dan tidak dikenakan biaya untuk menebusnya (gratis). Dan pada bulan April 2018 pemerintah mengganti kembali menjadi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), bantuan dari pemerintah tersebut sebesar Rp. 110.000/KPM/Bulan yang tidak dapat di cairkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras dan telur. Besar Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengalami perkembangan yang didasarkan pada perubahan situasi dan kondisi di masyarakat. Data terakhir yang di himpun menunjukkan adanya peningkatan bantuan menjadi Rp. 200.000/KPM/Bulan karena adanya Covid-19.¹⁵

Desa Balesono merupakan salah satu desa yang sudah menerapkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat yang terdaftar sebagai Pekerja Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Tulungagung tercatat sebanyak kurang lebih 200 keluarga yang menerima Bantuan Pangan Non-Tunai. Penerima BPNT di Desa Balesono memiliki karakteristik masyarakat yang beraneka ragam. Keragaman meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, serta tingkat perekonomian (kelas sosial) yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen penerim Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Balesono memiliki keragaman yang mempengaruhi prefensi dan kepuasan konsumen penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap beras dan telur yang disediakan oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung.

¹⁵ Wawancara dengan salah satu Pemilik E-Warong di Desa Balesono, Kecamatan Ngunut, 29 September 2021.

Pada penelitian ini peneliti tertarik meneliti tentang program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) saja, karena program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ini merupakan pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut memang sudah cukup lama ada dan sudah sampai tiga kali diperbarui dan yang terakhir ini bernama program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan pada saat *prasurvey* peneliti menemukan beberapa masalah, diantaranya berkaitan dengan kualitas dari beras yang diterima masyarakat, masih banyak ditemui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang komplek akibat bantuan yang disalurkan tidak sesuai pada bulan kemarin.

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul “Eksistensi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Dengan Pendekatan Maqashid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang muncul, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan teori Maqashid Syariah?
2. Bagaimana dampak Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan teori Maqashid Syariah?

3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan teori Maqashid Syariah.
2. Untuk menganalisis dampak Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan teori Maqashid Syariah.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau nilai guna baik dalam bidang ilmiah maupun dalam bidang terapan. Peneliti menerangkan beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi untuk setiap orang yang membacanya, serta menambah wawasan dan pemahaman mengenai seberapa besar pengaruh program bantuan bagi masyarakat.

2. Secara Praktisi

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada 3 pihak, yaitu:

a. Bagi Lembaga

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja menjadi lebih baik lagi, serta memberikan masukan atau bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan agar program bantuannya berjalan dengan baik.

b. Bagi Akademis

Dapat menjadi bahan masukan terhadap penelitian yang saling berkaitan serta dapat memberikan partisipasi dalam wawasan tambahan di bidang ekonomi syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dan penelitian ini sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan dapat dikembangkan menjadi lebih sempurna.

E. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Eksistensi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di

Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Dengan Pendekatan Maqasids Syariah”. Penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Balesono.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya berkaitan pada pemanfaatan peran masyarakat yang mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Balesono.

F. Penegasan Istilah

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Program BPNT

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial yang hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan melalui system perbankan dengan tujuan dapat mendukung perilaku produktif dari penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program dalam mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan program.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Prawa, kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁶

3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁷

4. Maqashid Syariah

Maqasid al-syariah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hokum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁸

¹⁶Rosni, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara", *Jurnal Geografi*: Vol. 9, No. 1, 2017, Hal. 57.

¹⁷ Yulid B.S Tlonaen, Willy Tri Hardianto, Carmia Diahloka, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*: Vol. 3, No. 1, 2014, Hal. 29.

¹⁸ Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014, Hal. 2.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir:

1. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari 6 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan terkait teori-teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian. Landasan teori tersebut terdiri dari: kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variable dan

skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan hasil paparan dari sesuatu penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis yang digunakan dalam sebuah pertanyaan maupun pernyataan.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan atas jawaban masalah penelitian, serta menguraikan temuan penelitian yang ada di lapangan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.